

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembaharuan hukum pidana nasional di Indonesia telah lama menjadi perbincangan dan kajian, baik di kalangan akademisi ataupun praktisi. Pembangunan atau pembaharuan hukum pidana ini merupakan cita-cita bangsa untuk mewujudkan hukum yang adil bagi masyarakat. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang ada saat ini merupakan hasil dari warisan zaman kolonial Belanda yang bersifat individualisme dan kolonialisme yang sebenarnya tidak sesuai dengan ideologi bangsa. Oleh karenanya pendahulu menginginkan KUHP kolonial ini hanya bersifat sementara dalam mengatur hukum pidana di Indonesia, namun ironisnya KUHP tersebut masih digunakan sampai sekarang.

Upaya untuk menggantikan KUHP warisan kolonial tersebut telah lama digagas oleh para pakar hukum pidana, bahkan sebenarnya usaha pembaharuan hukum di Indonesia yang sudah dimulai sejak proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak dapat dilepaskan dari landasan dan sekaligus tujuan nasional yang ingin dicapai seperti dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya alinea ke empat sebagai berikut:

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka Yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/ Perwakilan, serta dengan mewujudkan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”.

Dari perumusan tujuan nasional yang tertuang dalam alinea ke empat UUD NRI 1945 tersebut, dapat diketahui dua tujuan nasional yang utama yaitu (1) untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, dan (2) untuk memajukan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila. Menurut Barda Nawawi Arief, terlihat dua kata kunci dari tujuan nasional, yaitu “perlindungan masyarakat” dan “kesejahteraan masyarakat”. Dua kata kunci itu identik dengan istilah yang dikenal dalam kepustakaan/ dunia keilmuan dengan sebutan “*social defence*” dan “*social welfare*”. Dengan adanya dua kata kunci inipun terlihat adanya asas keseimbangan dalam tujuan pembangunan nasional. Perlu dicatat, bahwa kedua istilah ini pun sering dipadatkan dalam satu istilah saja, yaitu “*social defence*”, karena di dalam istilah “perlindungan masyarakat” sudah tercakup juga “kesejahteraan masyarakat”.¹

Tujuan nasional itu tentunya merupakan garis kebijakan umum yang menjadi landasan dan sekaligus tujuan politik hukum di Indonesia. Ini pulalah yang seharusnya menjadi landasan dan tujuan dari setiap usaha pembaruan

¹ Barda Nawawi Arief, 2009, *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, hal. 43.

hukum, termasuk pembaruan hukum pidana dan tujuan penanggulangan kejahatan (dengan hukum pidana) di Indonesia. Seminar Kriminologi ketiga tahun 1976 dalam kesimpulannya senada dengan tujuan nasional tersebut menyatakan:²

“Hukum pidana hendaknya dipertahankan sebagai salah satu sarana untuk “*social defence*” dalam arti melindungi masyarakat terhadap kejahatan dengan memperbaiki atau memulihkan kembali (“*rehabilitatie*”) si pembuat tanpa mengurangi keseimbangan kepentingan perorangan (pembuat) dan masyarakat.”

Selain uraian di atas, ada faktor lain yang tidak dapat dihindari, yaitu perkembangan masyarakat yang semakin modern menimbulkan pergeseran-pergeseran kultur serta nilai-nilai yang ada di masyarakat, dan kemudian tidak diimbangi dengan hukum yang ada, akibatnya masyarakat merasakan ketidakadilan hukum yang berdampak juga pada ketidakpercayaan terhadap penegak hukum. Artinya, penyusunan konsep rancangan KUHP baru adalah dalam rangka menyesuaikan dengan nilai-nilai dan keadaan masyarakat sekarang ini serta memperhitungkan kondisi masyarakat yang akan datang. Hal ini karena KUHP yang berlaku saat ini dianggap sudah tidak lagi menjawab permasalahan hukum yang ada di Indonesia khususnya dalam perkembangan terkini yang sudah modern cenderung menimbulkan ketidakpuasan masyarakat dalam dalam penegakan hukum.

² Keputusan Seminar Kriminologi Ketiga, 26 dan 27 Oktober 1976, hal 4.

Hal tersebut sejalan dengan pendapat Agustinus Pohan, bahwa pembaharuan hukum pidana Indonesia didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut:³

1. KUHP dipandang tidak lagi sesuai dengan dinamika perkembangan hukum pidana nasional Indonesia.
2. Perkembangan Hukum Pidana diluar KUHP, baik berupa hukum pidana khusus maupun hukum pidana administrasi telah menggeser keberadaan system hukum pidana dalam KUHP. Keadaan ini telah mengakibatkan terbentuknya lebih dari satu system hukum pidana yang berlaku dalam system hukum pidana nasional.
3. Dalam beberapa hal telah juga terjadi duplikasi norma hukum pidana antara norma hukum pidana dalam KUHP dengan norma hukum pidana dalam undang-undang di luar KUHP.

Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Sudarto, bahwa terdapat 3 (tiga) alasan perlunya memperbarui KUHP. Yakni alasan sosiologis, politis, dan praktis (kebutuhan dalam praktik):⁴

1. Dari segi politik, wajar bagi bangsa Indonesia yang sudah merdeka untuk mempunyai KUHP sendiri karena hal itu adalah merupakan simbol (lambang) dari kebanggaan sebagai bangsa yang telah merdeka.

³ Agustinus Pohan, *Pembaharuan Hukum Pidana*, diakses dari www.antikorupsi.org pada 7 April 2017.

⁴ Sudarto, 1983, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru: Bandung, hal. 66.

2. Karena dalam teks resmi KUHP adalah berbahasa Belanda maka sehubungan dengan hal itu, tidaklah cocok dengan Bahasa Indonesia yang sudah mendarah daging dari Bangsa Indonesia ini.
3. Secara sosiologis, KUHP tidak mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Ini tentunya bertentangan dengan masalah kebudayaan, di sisi lain KUHP Belanda berdasarkan sistem kapitalisme, dan liberal. Sementara bangsa Indonesia berdasarkan kebersamaan, kekeluargaan. Maka dari itulah sudah tidak cocok bahwa KUHP untuk diterapkan di Indonesia.

Kemudian, Muladi menambahkan bahwa salah satu karakteristik hukum pidana yang mencerminkan proyeksi hukum pidana masa yang akan datang adalah hukum pidana nasional dibentuk tidak hanya sekedar atas alasan sosiologis, politis, dan praktis semata-mata melainkan secara sadar harus disusun dalam rangka kerangka Ideologi Nasional Pancasila.⁵

Dalam Naskah Akademik Rancangan KUHP disebutkan bahwa usaha pembaharuan KUHP, di samping ditujukan terhadap pembaharuan dan peninjauan kembali terhadap 3 (tiga) permasalahan utama dalam hukum pidana, yaitu:⁶

1. Perumusan perbuatan yang dilarang (*criminal act*).
2. Perumusan pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*).

⁵ Muladi, 1990, *Proyeksi Hukum Pidana Materiil Dimasa Yang Akan Datang*, Pidato pengukuhan Guru Besar Ilmu Hukum UNDIP, Semarang, hal. 3.

⁶ Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Hal. 24

3. Perumusan sanksi baik berupa pidana (*punishment*) maupun tindakan (*treatment*).

Dari ketiga permasalahan tersebut, salah satu yang paling menarik untuk dikaji adalah mengenai pidana dan ppidanaan. Menjadi suatu hal penting dikarenakan sanksi pidana merupakan bentuk hukuman yang wajib diterima oleh setiap terpidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatan melanggar hukumnya. Selain itu tujuan adanya sanksi diharapkan pelaku kejahatan tidak akan melakukan kejahatan itu lagi dan masyarakat pun menjadi tahu akibatnya apabila melanggar suatu peraturan perundang-undangan.⁷

Terdapat beberapa ahli yang mengemukakan tentang arti pidana, antara lain sebagai berikut:

1. Moelyatno mengatakan istilah hukuman yang berasal dari kata “*straf*” dan istilah “dihukum” yang berasal dari perkataan “*wordt gestraft*”, merupakan istilah- istilah yang kontroversial. Beliau menggunakan istilah yang inkontroversial yaitu pidana yang menggantikan kata “*straf*” dan “diancam dengan pidana” untuk menggantikan kata “*wordt gestraft*”.⁸
2. Sudarto menyatakan, secara tradisional pidana didefinisikan sebagai nestapa yang dikenakan oleh negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang, sengaja

⁷ Putu Astrid Yolanda Sari, *Pidana Kerja Sosial Dalam Rangka Mencapai Tujuan Ppidanaan*, diakses dari ojs.unud.ac.id pada 7 April 2017.

⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, hal. 1.

akan dirasakan sebagai nestapa. Roeslan Saleh menyatakan, pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik itu.⁹

3. Andi Hamzah bahwa: “Pidana disebut juga sebagai penjatuan pidana atau pemberian pidana atau penghukuman yang bahasa Belanda disebut *Straftoemeting* dan dalam bahasa Inggris disebut *Sentencing*.¹⁰

Adapun tujuan daripada pembedaan, sebagaimana pandangan utilitarian dan pendekatan integratif adalah sebagai berikut:¹¹

- a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat:
- b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna, serta mampu untuk hidup bermasyarakat:
- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat: dan
- d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana

⁹ Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, hal. 109-110

¹⁰ Tolib Setiady, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung: Alfabeta, h. 21.

¹¹ Muladi, *Jenis-jenis Pidana Pokok Dalam KUHP*, Makalah, disampaikan pada Lokakarya Bab-bab Kodifikasi Hukum Pidana tentang Sanksi Pidana yang diselenggarakan oleh BPHN-Departemen Kehakiman di Jakarta, tanggal 5-7 Februari 1986. Hlm. 3-4.

Menurut aliran klasik tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi individu dari kekuasaan penguasa atau negara, sedangkan tujuan pidananya adalah untuk memperjuangkan hukum pidana yang lebih adil dan obyektif dalam penjatuhan pidana.¹²

Aliran modern juga mengemukakan bahwa tujuan hukum pidana menurut aliran ini adalah mengembangkan penyelidikan terhadap kejahatan dan penjahat, asal-usul serta cara pencegahan agar masyarakat terlindung dari kejahatan.¹³

Sementara dalam RKHUP Tahun 2015 tujuan pemidanaan ditegaskan dalam Pasal 55 yang menyatakan bahwa pemidanaan bertujuan :

- a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
- b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan
- d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Dari beberapa uraian di atas pada dasarnya memiliki tujuan pidana yang sama, yakni sama-sama bertujuan untuk melindungi masyarakat agar tetap mendapatkan keadilan, kepastian dan kemanfaatan dari suatu aturan

¹² Ninik Suparini, 2007, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, h.12.

¹³ *Ibid*

perundang-undangan baik itu kepada terdakwa ataupun korban. Pidana merupakan sanksi yang dijatuhkan kepada seseorang sebagai upaya terakhir dalam sebuah perkara. Perlu atau tidaknya hukum pidana dalam masyarakat terletak pada tujuan yang hendak dicapai pada suatu perkara.

Adapun bentuk daripada pidana adalah berupa adanya sanksi. Sanksi pidana yang saat ini ada, dimuat dalam Pasal 10 KUHP, bahwa jenis pidana ada 2 macam, yaitu terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan. Adapun pidana pokok meliputi: a) Pidana mati; b) Pidana penjara; c) Pidana kurungan; d) Pidana tutupan; dan e) Pidana denda. Sementara pidana tambahan meliputi: a) Pencabutan hak-hak tertentu; b) Perampasan barang-barang tertentu; c) Pengumuman keputusan hakim.

Sedangkan sanksi pidana menurut Draft RUU KUHP Tahun 2015 ditegaskan dalam pasal 66 ayat (1), yang berbunyi “Pidana pokok terdiri atas:

- a. pidana penjara;
- b. pidana tutupan;
- c. pidana pengawasan;
- d. pidana denda; dan
- e. pidana kerja sosial.

Pidana tambahan disebutkan dalam Pasal 68 ayat (1) terdiri atas:

- a. pencabutan hak tertentu;
- b. perampasan barang tertentu dan/atau tagihan;
- c. pengumuman putusan hakim;
- d. pembayaran ganti kerugian; dan
- e. pemenuhan kewajiban adat setempat atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat.

Uraian di atas menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pidana pokok KUHP dan RUU KUHP Tahun 2015, yaitu tidak adanya ketentuan pidana

mati dan tambahan mengenai pidana kerja sosial. Pidana kerja sosial merupakan salah satu kajian menarik dalam pembaharuan hukum pidana.

Pidana kerja sosial sebenarnya sudah diperkenalkan sejak lama, yaitu dalam konsep Rancangan KUHP tahun 1991/1992 yang diketuai oleh Mardjono Reksodiputro jenis pidana diatur dalam pasal 57, pidana kerja sosial masih menggunakan istilah pidana kerja bakti, yang tercantum dalam pidana pokok. Kemudian konsep KUHP tahun 2000 mengenai ppidanaan diatur dalam pasal 60, dalam rancangan ini jenis pidananya sudah memakai kata pidana kerja sosial.¹⁴

Pidana kerja sosial merupakan bentuk pidana dimana pidana tersebut dijalani oleh terpidana dengan melakukan pekerjaan sosial yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan Putusan Pengadilan. Pidana kerja sosial ini tidak dibayar karena sifatnya sebagai pidana (*work as a penalty*), oleh karena itu pelaksanaan pidana ini tidak boleh mengandung hal-hal yang bersifat komersial.¹⁵

Secara umum di negara Eropa maupun di RUU KUHP Indonesia, pidana kerja sosial dapat diterapkan terhadap tindak pidana yang tidak terlalu berat dan melebihi pidana denda katagori I. Adapun alasan untuk memuat pidana kerja sosial sebagai salah satu pidana pokok dalam Rancangan KUHP adalah sebagai berikut:

¹⁴ Eva Norita, 2009, *Pidana Kerja Sosial Dalam Kebijakan Kriminal Hukum Pidana Indonesia*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, hal. 13.

¹⁵ Tongat, 2001, *Pidana Kerja Sosial dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Djambatan, hal 7.

Pertama, Adanya pertimbangan kemanusiaan, pidana perampasan kemerdekaan semakin tidak disukai oleh karena jenis pidana ini mempunyai dampak negatif yang tidak kecil tidak saja terhadap narapidana, tetapi juga terhadap keluarga serta orang-orang yang kehidupannya tergantung dari narapidana tersebut.¹⁶

Kedua, Adanya keinginan untuk menggunakan alternatif jenis pidana sebagai variasi dari pemidanaan jangka pendek, mengingat kondisi Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia sebagai lembaga terakhir dalam sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*) telah mengalami over kapasitas. Sehingga over kapasitas dapat berdampak pada timbulnya suasana tidak sehat dan berpotensi menimbulkan keributan, serta kurang optimalnya kualitas pembinaan dan pemenuhan kebutuhan kesehatan.

Ketiga, napi-napi dengan hukuman minimal cenderung menjadi pembuat onar di penjara, karena mereka berpikir tidak akan dihukum lama. Napi-napi ini biasanya juga mempratekkan ilmu kriminal baru hasil berguru di penjara.

Berdasarkan uraian di atas sangat menarik untuk dibahas bagaimana prospek penerapan pidana kerja sosial dalam perspektif pembaharuan hukum pidana di Indonesia, sehingga judul yang penulis angkat adalah **“Urgensi Ancaman Pidana Kerja Sosial (*Community Service Order*) Terhadap Tindak Pidana Ringan dalam RUU KUHP Nasional (Suatu Studi Sistem Pemidanaan dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana)”**

¹⁶ *Ibid*, hal. 14-15

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana urgensi memasukkan pidana kerja sosial dalam pembaharuan sistem pemidanaan di Indonesia?
2. Bagaimana pola pidana kerja sosial dalam RKUHP berdasarkan perspektif pembaharuan hukum pidana di Indonesia?

C. Tujuan

Tujuan penulisan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui urgensi penerapan pidana kerja sosial dalam pembaharuan sistem pemidanaan di Indonesia.
2. Untuk mengetahui pola pidana kerja sosial dalam RKUHP berdasarkan perspektif pembaharuan hukum pidana di Indonesia.

D. Manfaat Penulisan

1. Manfaat teoritis: dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan informasi lebih lanjut untuk melahirkan berbagai konsep keilmuan serta wawasan baru guna kepentingan perkembangan ilmu pengetahuan hukum pidana, yaitu konsep pemidanaan di Indonesia, khususnya pidana kerja sosial (*community service order*) dalam RUU KUHP terhadap tindak pidana ringan berdasarkan perspektif pembaharuan hukum pidana di Indonesia
2. Manfaat praktis, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan wawasan kepada masyarakat yang berkaitan dengan konsep pemidanaan di Indonesia, khususnya pidana kerja sosial

(*community service order*) dalam RUU KUHP terhadap tindak pidana ringan berdasarkan perspektif pembaharuan hukum pidana di Indonesia.

E. Kegunaan Penulisan

1. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis dan menjadi acuan di bidang ilmu hukum dalam rangka menambah pengetahuan dan wawasan tentang permasalahan yang penulis angkat, serta sebagai syarat untuk penulisan Tugas Akhir dalam studi Sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

2. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu pelajaran baru terutama dalam bidang praktisi hukum dikemudian hari sehingga mahasiswa khususnya mahasiswa jurusan hukum dapat berperan dalam penegakan hukum ditengah masyarakat.

3. Bagi Pemerintah

Hasil penulisan ini dapat dijadikan suatu masukan dan sumbangsih untuk pemerintah, khususnya para penegak hukum, baik Kepolisian, Jaksa, maupun Hakim terkait dengan konsep pembedaan di Indonesia, khususnya pidana kerja sosial (*community service order*) dalam RUU KUHP terhadap tindak pidana ringan berdasarkan perspektif pembaharuan hukum pidana di Indonesia.

F. Metode Penulisan

1. Metode pendekatan

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan sehingga mencapai tujuan penelitian atau penulisan.¹⁷ Berdasarkan ruang lingkup serta identifikasi masalah sebagaimana telah diuraikan, untuk mengkaji secara komprehensif dan holistik pokok permasalahan, akan ditelusuri dengan menggunakan tipe penelitian yuridis normatif (*normatif legal research*). Yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan perundang-undangan, dan didukung dengan literatur yang ada mengenai pokok permasalahan yang dibahas.

Adapun metode pendekatan yang digunakan adalah *pertama*, Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan mengkaji semua undang-undang dan pengaturan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. *Kedua*, pendekatan konsep (*conceptual approach*) yaitu penulis hendak menawarkan konsep model pembedaan berdasarkan perspektif pembaharuan hukum pidana di Indonesia.

2. Bahan Hukum

Bahan hukum penulisan hukum ini meliputi:

- a. Bahan Hukum Primer meliputi: Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Rancangan Undang-Undang KUHP.

¹⁷ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 112.

b. Bahan Hukum Sekunder: Bahan hukum sekunder diperoleh dari jurnal-jurnal, buku-buku, makalah, atau sumber-sumber lain baik cetak maupun online yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini seperti. Adapun beberapa buku yang relevan dengan penulisan Tugas Akhir ini adalah:

- 1) Barda Nawawi Arief, dengan judul “Tujuan dan Pedoman Pemidanaan”.
- 2) Barda Nawawi Arief, dengan judul “Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana”.
- 3) Barda Nawawi Arief, dengan judul “Kebijakan Legislatif dengan Pidana Penjara”.
- 4) Barda Nawawi Arief, dengan judul “RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi/ Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia”.
- 5) Sudarto, dengan judul “Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat”.
- 6) Sudarto, dengan judul “Kapita Selektta Hukum Pidana, Bandung: Alumni”.
- 7) Muladi dan Barda Nawawi Arief, dengan judul “Teori-Teori dan Kebijakan Pidana”.
- 8) Tolib Setiady, dengan judul “Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia”.

9) Tongat, dengan judul “Pidana Kerja Sosial dalam Pembaharuan Hukum Pidana”.

10) Leden Marpaung, dengan judul “Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana”

c. Bahan Hukum tersier: merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bahan-bahan hukum primer dan sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan adalah model studi kepustakaan (*library research*). Yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif,¹⁸ yakni penulisan yang didasari pada data-data yang dijadikan obyek penulisan kemudian dikaji dan disusun secara komprehensif.

4. Teknik Analisa Bahan Hukum

Analisis data di dalam penelitian ini, dilakukan secara kualitatif yakni pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin dan pasal-pasal di dalam undang-undang. Kemudian membuat sistematika dari data-data tersebut sehingga akan menghasilkan urgensi dan pola penerapan pidana kerja sosial (*community service order*) dalam RUU KUHP terhadap tindak pidana ringan berdasarkan perspektif

¹⁸ Jhony Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia, halaman 392

pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Data yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian secara sistematis dengan menjelaskan hubungan antar jenis data. Selanjutnya semua data diseleksi dan diolah kemudian dinyatakan secara deskriptif sehingga selain menggambarkan dan mengungkapkan dasar hukumnya dan dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang dimaksud.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan penulisan hukum ini, penulis membagi dalam 4 bab dan masing-masing bab terdiri atas sub yang bertujuan agar mempermudah pemahamannya. Adapun sistematika penulisannya sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Merupakan bab yang memuat pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini penulis akan memaparkan teori-teori maupun kaidah-kaidah yang bersumber dari undang-undang, buku atau literature yang berkaitan dengan permasalahan maupun dari internet.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi mengenai uraian pembahasan yang diangkat oleh penulis serta dianalisis secara content dan dianalisa kesesuaian atau keselarasan berdasarkan kenyataan yang ada (yang terjadi)

didukung dengan teori-teori yang relevan dengan permasalahan dalam penulisan ini.

BAB IV PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penulisan hukum ini dimana berisi kesimpulan dari pembahasan bab sebelumnya serta berisikan saran penulis dalam menanggapi permasalahan yang menjadi fokus kajian.

BAB IV PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penulisan hukum ini dimana berisi kesimpulan dari pembahasan bab sebelumnya serta berisikan saran penulis dalam menanggapi permasalahan yang menjadi fokus kajian serta berisikan saran dan rekomendasi penulis sehingga diharapkan menjadi masukan yang bermanfaat bagi semua pihak.